

Analisis pemenuhan asas keadilan dan netralitas pada kebijakan pajak penghasilan atas dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi

Henny Retnani Kusuma Waedani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=132945&lokasi=lokal>

Abstrak

Sejak berlakunya Undang Undang (UU) No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, diatur ketentuan baru mengenai pemajakan dividen yang diterima atau diperoleh orang pribadi. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.19 tahun 2009, pemajakan atas dividen yang diterima atau diperoleh orang pribadi dikenakan PPh final sebesar 10%. Penurunan tarif atas pemajakan dividen, diharapkan akan berpengaruh terhadap meningkatnya daya saing negara Indonesia untuk menarik investasi baik dari penanaman modal domestik maupun asing. Tesis ini membahas kebijakan Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi ditinjau dari asas keadilan dan netralitas sebagai dasar pemungutan pajak yang baik. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi belum dapat memenuhi asas keadilan dan netralitas. Disarankan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem pemajakan dividen agar mampu memenuhi asas keadilan dan netralitas.

.....Since the ratification of Act No.36 Year 2008, the imposition of Income Tax on Dividend Received by Domestic Individual Tax Payer was changed. According to Regulation No.19 of 2009, the tariff of Income Tax on Dividend Received by Domestic Individual Tax Payer is 10% through the imposition of final tax. The lower tariff may encourage Indonesia competitiveness to attract investment. This thesis describes the income tax policy of dividend received by individual taxpayer based on equity and neutrality principles. The research approach used shall be a quantitative research using a descriptive research type. The research results indicate that income tax policy of dividend received by individual taxpayer have not met the terms of equity and neutrality principles. It is recommended that government perform an evaluation on the dividend taxation system to meet the terms of equity and neutrality principles.